



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 127 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 21);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 66);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran

- Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 59);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 53);
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 22);
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 241.191.966.721,00
b. Dana Perimbangan	Rp 1.078.044.419.330,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 380.604.729.000,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan	Rp 1.699.841.115.051,00
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 637.071.589.273,00
2) Belanja Bunga	Rp 4.000.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp 78.581.198.500,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp 8.947.905.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp 4.985.000.000,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 328.696.241.495,00
7) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 500.000.000,00</u> (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 1.062.781.934.268,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 83.523.899.416,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 350.312.268.138,00
3) Belanja Modal	<u>Rp 226.739.265.798,00</u> (+)
Jumlah Belanja Langsung	Rp 660.575.433.352,00
Jumlah Belanja	Rp 1.723.357.367.620,00
Suplus/(Defisit)	Rp (23.516.252.569,00)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	76.514.203.661,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>52.997.951.092,00 (-)</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	23.516.252.569,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


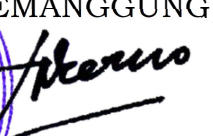
Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 127



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN	1.699.841.115.051.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	241.191.966.721.00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	36.046.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.109.186.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.442.780.721,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.078.044.419.330.00
4.2.1	Dana Bagi Hasil	52.099.367.330,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	793.801.136.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	232.143.916.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	380.604.729.000.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	63.789.400.000,00
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.450.000.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000,00
4.3.6	Dana Desa	211.615.329.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.699.841.115.051.00
5	BELANJA DAERAH	1.723.357.367.620.00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.062.781.934.268,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	637.071.589.273,00
5.1.2	BELANJA BUNGA	4.000.000.000,00
5.1.4	BELANJA HIBAH	78.581.198.500,00
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.947.905.000,00
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA	4.985.000.000,00
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	328.696.241.495,00
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	660.575.433.352,00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83.523.899.416,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.312.268.138,00
5.2.3	BELANJA MODAL	226.739.265.798,00
	Jumlah Belanja	1.723.357.367.620,00
	SURPLUS (DEFISIT)	(23.516.252.569,00)
6	PEMBIAYAAN	23.516.252.569,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	76.514.203.661,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	46.514.203.661,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	76.514.203.661,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.997.951.092,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.997.951.092,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	28.000.000.000,00
6.2.7	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	52.997.951.092,00
	Pembiayaan Netto	23.516.252.569,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN	1.699.841.115.051
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	241.191.966.721
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	36.046.000.000
4.1.1.01	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	105.000.000
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	40.000.000
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	38.000.000
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	17.000.000
4.1.1.02	Pajak Restoran	135.000.000
4.1.1.02.01	Restoran	60.000.000
4.1.1.02.02	Rumah Makan	70.000.000
4.1.1.02.04	Kantin	5.000.000
4.1.1.03	Pajak Hiburan	15.000.000
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	7.000.000
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	7.000.000
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	1.000.000
4.1.1.04	Pajak Reklame	550.000.000
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	400.000.000
4.1.1.04.02	Reklame Kain	140.000.000
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	10.000.000
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	15.516.000.000
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	15.516.000.000
4.1.1.07	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.500.000.000
4.1.1.07.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.500.000.000
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	300.000.000
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	300.000.000
4.1.1.09	Pajak Parkir	80.000.000
4.1.1.09.01	Pajak Parkir	80.000.000
4.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan	12.750.000.000
4.1.1.10.01	Pajak Bumi dan Bangunan	12.650.000.000
4.1.1.10.02	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan	100.000.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.109.186.000
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	13.028.900.000
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	750.000.000
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.365.403.000
4.1.2.01.14	Retribusi penempatan awal	7.866.662.000
4.1.2.01.15	Retribusi parkir	231.835.000
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.350.286.000
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	131.100.000
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	227.986.000
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	38.000.000
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	84.000.000
4.1.2.02.14	Sewa Gedung Olah raga	34.200.000

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.2.02.17	Sewa Mesin Gilas	70.000.000
4.1.2.02.19	Sewa Tempat Reklame	120.000.000
4.1.2.02.20	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Balai Benih Ikan	330.000.000
4.1.2.02.24	Sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan	315.000.000
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.730.000.000
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	100.000.000
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	30.000.000
4.1.2.03.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	850.000.000
4.1.2.03.11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000
4.1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.594.000.000
4.1.3.01.01	Bank Jateng	4.612.000.000
4.1.3.01.02	Perusahaan Daerah Air Minum	1.399.000.000
4.1.3.01.03	Perusahaan Daerah Bank Pasar	4.600.000.000
4.1.3.01.04	Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo	172.000.000
4.1.3.01.05	PD BPR BKK Temanggung	1.111.000.000
4.1.3.01.06	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	100.000.000
4.1.3.01.07	Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata	600.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.442.780.721
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	415.899.700
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	10.000.000
4.1.4.01.15	Penjualan hasil perkebunan	0
4.1.4.01.19	Penerimaan Radio Temanggung	24.500.000
4.1.4.01.22	Pendapatan lainnya	331.399.700
4.1.4.01.27	Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	50.000.000
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	4.000.000.000
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.000.000.000
4.1.4.03	Pendapatan Bunga deposito	8.924.075.721
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	8.924.075.721
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.000.000
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	5.000.000
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	85.500.000
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000
4.1.4.08.05	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	77.500.000
4.1.4.15	Pendapatan BLUD	125.000.000.000
4.1.4.15.01	Pendapatan BLUD	125.000.000.000
4.1.4.16	Pemanfaatan/pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	1.000.000.000
4.1.4.16.07	Pemakaian/pendayagunaan tanah bengkok kelurahan	1.000.000.000
4.1.4.21	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	36.012.305.300
4.1.4.21.01	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Dharma Rini	1.257.545.013
4.1.4.21.02	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bulu	1.773.466.190
4.1.4.21.03	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tembarak	1.860.950.342
4.1.4.21.04	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Selopampang	965.347.208
4.1.4.21.05	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Temanggung	1.800.038.232
4.1.4.21.06	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kranggan	1.071.746.422
4.1.4.21.07	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tlogomulyo	936.579.602
4.1.4.21.08	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pringsurat	2.430.932.536
4.1.4.21.09	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kaloran	1.024.301.711
4.1.4.21.10	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kandangan	1.837.385.039
4.1.4.21.11	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kedu	1.786.589.871
4.1.4.21.12	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Parakan	1.497.851.983
4.1.4.21.13	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bansari	953.050.566

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.4.21.14	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kledung	1.165.001.862
4.1.4.21.15	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ngadirejo	3.588.462.922
4.1.4.21.16	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jumo	1.314.619.644
4.1.4.21.17	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gemawang	1.687.628.184
4.1.4.21.18	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tretep	804.647.731
4.1.4.21.19	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Candiroto	1.563.067.970
4.1.4.21.20	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bejen	2.302.830.970
4.1.4.21.21	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tepusen	882.246.783
4.1.4.21.22	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Traji	854.842.415
4.1.4.21.23	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pare	890.199.359
4.1.4.21.24	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wonobojo	898.563.338
4.1.4.21.25	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Rejosari	864.409.407
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.078.044.419.330
4.2.1	Dana Bagi Hasil	52.099.367.330
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	22.231.770.330
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	8.412.105.000
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	13.819.665.330
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29.867.597.000
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan	267.463.000
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	943.027.000
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Migas	181.972.000
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	21.547.000
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	28.450.000.000
4.2.1.02.13	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba	3.588.000
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	793.801.136.000
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	793.801.136.000
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	793.801.136.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	232.143.916.000
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	54.405.000.000
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan	10.072.000.000
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan KB	16.084.000.000
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan	1.071.000.000
4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian	2.057.000.000
4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup	955.000.000
4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK) Keluarga Berencana	1.587.000.000
4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi	16.990.000.000
4.2.3.01.18	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	5.589.000.000
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	177.738.916.000
4.2.3.02.01	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	12.532.200.000
4.2.3.02.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Tunjangan Profesi Guru	139.895.238.000
4.2.3.02.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Tambahan Penghasilan Guru	1.197.000.000
4.2.3.02.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Bantuan Operasional Kesehatan	17.155.457.000
4.2.3.02.08	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Bantuan Operasional KB	5.148.240.000
4.2.3.02.09	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.810.781.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	380.604.729.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	63.789.400.000
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	1.350.000.000
4.3.1.03.01	Badan/lembaga/organisasi swasta	1.350.000.000
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	62.439.400.000

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah BOS Sekolah Dasar (SD)	43.148.800.000
4.3.1.06.02	Pendapatan Hibah BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)	19.290.600.000
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.450.000.000
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	86.450.000.000
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	17.906.100.000
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.589.782.000
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.203.200.000
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	31.574.000
4.3.3.01.13	Pajak Rokok	30.719.344.000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000
4.3.4.03	Dana Insentif Daerah	18.750.000.000
4.3.4.03.01	Dana Insentif Daerah	18.750.000.000
4.3.6	Dana Desa	211.615.329.000
4.3.6.01	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	211.615.329.000
4.3.6.01.01	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	211.615.329.000
*	Jumlah Pendapatan	1.699.841.115.051
5	BELANJA DAERAH	1.723.357.367.620
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.062.781.934.268
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	637.071.589.273
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	464.928.005.660
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	354.696.381.333
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	31.328.344.710
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	9.631.515.900
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	22.838.541.125
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	4.868.645.975
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	18.120.938.350
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.496.788.935
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.585.021
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.179.465.211
5.1.1.01.10	Uang Paket	86.058.000
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	29.414.700
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	55.906.200
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	29.414.700
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.317.700
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	144.333.000
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	4.276.800.000
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	50.000.000
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	57.120.000
5.1.1.01.19	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	1.796.886.800
5.1.1.01.20	Tunjangan Transportasi	3.810.048.000
5.1.1.01.21	Tunjangan Reses	1.417.500.000
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	163.155.474.763
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	50.000.000.000
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	63.236.763
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.197.000.000
5.1.1.02.08	Tunjangan Profesi Guru PNSD	111.895.238.000
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.522.000.000
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000
5.1.1.03.02	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000
5.1.1.03.03	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.1.06	Insentif pemungutan Pajak	1.511.200.000

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.1.06.01	Belanja pajak	1.511.200.000
5.1.1.07	Insentif pemungutan retribusi	954.908.850
5.1.1.07.01	Belanja retribusi	954.908.850
5.1.2	BELANJA BUNGA	4.000.000.000
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	4.000.000.000
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah	347.000.000
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank	3.653.000.000
5.1.4	BELANJA HIBAH	78.581.198.500
5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan	78.581.198.500
5.1.4.04.01	Belanja Hibah Urusan Pendidikan	22.631.200.000
5.1.4.04.02	Belanja Hibah Urusan Kesehatan	100.000.000
5.1.4.04.03	Belanja Hibah Urusan Pekerjaan Umum	2.000.000.000
5.1.4.04.05	Belanja Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.800.000.000
5.1.4.04.06	Belanja Hibah Urusan Sosial	200.000.000
5.1.4.04.19	Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	6.550.000.000
5.1.4.04.22	Belanja Hibah Urusan Kebudayaan	721.000.000
5.1.4.04.27	Belanja Hibah Urusan Pertanian	300.000.000
5.1.4.04.31	Belanja Hibah Urusan Perindustrian	500.000.000
5.1.4.04.34	Belanja Hibah Urusan Pendukung	19.770.000.000
5.1.4.04.35	Belanja Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.008.998.500
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.947.905.000
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat	8.947.905.000
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Urusan Pendidikan	810.000.000
5.1.5.01.06	Belanja Bantuan Sosial Urusan Sosial	8.087.905.000
5.1.5.01.08	Belanja Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA	4.985.000.000
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.400.000.000
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.400.000.000
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.585.000.000
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.585.000.000
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	328.696.241.495
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	327.603.830.000
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	115.988.501.000
5.1.7.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat	211.615.329.000
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.092.411.495
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.092.411.495
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	660.575.433.352
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83.523.899.416
5.2.1.01	Honorarium PNS	13.111.583.750
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.221.313.750
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	191.550.000
5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	184.170.000
5.2.1.01.05	Honorarium tim penilai	233.430.000
5.2.1.01.06	Honorarium tim pengawas	281.120.000
5.2.1.02	Honorarium non PNS	49.432.086.991
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	36.534.038.580
5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	10.410.929.900
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.487.118.511
5.2.1.03	Uang Lembur	1.375.165.270

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	1.091.610.270
5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	283.555.000
5.2.1.04	Belanja Pegawai BLUD	6.667.111.405
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai BLUD	6.667.111.405
5.2.1.05	Belanja Pegawai BOS	12.937.952.000
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BOS	12.937.952.000
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.312.268.138
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.456.510.220
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.999.840.280
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender	6.870.000
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.148.943.790
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	168.305.000
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	729.880.600
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	202.481.850
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	12.470.000
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	102.284.000
5.2.2.01.09	Belanja peralatan kedokteran umum	50.570.000
5.2.2.01.11	Belanja peralatan rumah tangga lainnya	33.064.700
5.2.2.01.12	Belanja Kartu Elektrik	1.800.000
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.008.567.800
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	13.246.399.500
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	593.621.000
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.679.833.300
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	58.482.000
5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	6.178.314.900
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Alat Studio	7.645.000
5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	1.532.727.000
5.2.2.02.09	Belanja pupuk tanaman	109.860.000
5.2.2.02.10	Bahan pakan ternak	108.326.000
5.2.2.02.11	Belanja bahan benih ikan	240.855.600
5.2.2.02.12	Belanja bahan percontohan	19.150.000
5.2.2.02.13	Belanja Sarana Pelayanan KB	500.200.000
5.2.2.02.14	Belanja bahan pelatihan	469.587.000
5.2.2.02.15	Belanja bahan makanan	284.669.000
5.2.2.02.16	Belanja perbekalan kesehatan	978.897.500
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.015.878.902
5.2.2.03.01	Belanja telepon	905.830.219
5.2.2.03.02	Belanja air	561.710.796
5.2.2.03.03	Belanja listrik	17.922.208.656
5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	12.000.000
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	303.610.992
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.589.681.160
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	500.000
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	79.000.000
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.465.000
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Konsultan Pendampingan	206.000.000
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemborongan	999.699.479
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengumuman lewat radio	55.700.000
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Service Alat Studio	25.860.000
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	975.797.100
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Kebersihan	929.128.000
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Fumigasi	9.100.000
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Grand Desain	10.890.000

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Service Alat Musik	2.183.000
5.2.2.03.24	Belanja jasa pelayanan kesehatan	7.114.200.000
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Service Alat Kesehatan	18.200.000
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Retribusi Kebersihan	13.722.000
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Uji Laboratorium	66.070.000
5.2.2.03.29	Belanja jasa administrasi kepegawaian	20.000.000
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.857.894.500
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Publikasi surat kabar/majalah	17.740.000
5.2.2.03.33	Belanja Perizinan	6.000.000
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Sewa Berita	37.000.000
5.2.2.03.37	Belanja jasa administrasi pungutan pajak bumi dan bangunan	8.000.000
5.2.2.03.39	Belanja jasa pemeliharaan peralatan komunikasi	11.820.000
5.2.2.03.40	Belanja jasa pemeliharaan peralatan pengolah data elektronik	3.500.000
5.2.2.03.41	Belanja jasa pemeliharaan jaringan komunikasi	93.500.000
5.2.2.03.42	Belanja jasa pemeliharaan komputer	50.458.000
5.2.2.03.43	Belanja penggantian peralatan kantor	71.410.000
5.2.2.03.44	Belanja jasa pengiriman barang	35.000.000
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	10.799.019.930
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10.400.000
5.2.2.04.03	Belanja Pemeliharaan Kesehatan (General Check Up)	52.875.000
5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	10.735.744.930
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.529.899.214
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	708.990.750
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.337.599.000
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.133.484.964
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	15.930.000
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	572.623.500
5.2.2.05.07	Belanja Biaya Transportasi	761.271.000
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.538.654.675
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.803.209.500
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.631.667.425
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	103.777.750
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.795.760.000
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.299.845.000
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	335.915.000
5.2.2.07.05	Belanja sewa	1.160.000.000
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.082.600.000
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.082.600.000
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	349.351.500
5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	42.151.500
5.2.2.09.03	Belanja sewa Alat Pemeliharaan Jalan	307.200.000
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.669.601.000
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	125.481.000
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	300.000
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	31.850.000
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	203.950.000
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	42.900.000
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	240.500.000
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Tanah	8.400.000
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	162.820.000
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Hiburan	849.900.000
5.2.2.10.14	Belanja Sewa Alat-alat listrik (lighting, AC, lampu dll.)	3.500.000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.003.709.800

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.486.268.800
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.693.374.000
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	939.156.500
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	17.060.000
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.731.635.500
5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Satpol PP	136.215.000
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.549.548.450
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	150.450.000
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	96.675.000
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	759.248.500
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	55.450.000
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	169.100.000
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	292.320.000
5.2.2.12.08	Belanja Atribut (Bros, Lencana, tanda jabatan dll)	26.304.950
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	348.670.300
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	292.020.300
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Dinas Lengan Panjang	56.650.000
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	750.280.000
5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	3.500.000
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	3.000.000
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	198.205.000
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	453.325.000
5.2.2.14.05	Belanja pakaian Satlak PBP	4.500.000
5.2.2.14.06	Belanja pakaian ibadah	58.000.000
5.2.2.14.07	Belanja pakaian Pramuka	3.500.000
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Jaket	26.250.000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.781.224.000
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.945.688.700
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.829.445.300
5.2.2.15.04	Belanja perjalanan dinas luar negeri	6.090.000
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan	13.000.000
5.2.2.16.02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	13.000.000
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	10.811.816.000
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	2.516.855.900
5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	17.010.000
5.2.2.17.03	Belanja transportasi	4.523.460.400
5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.754.489.700
5.2.2.18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	119.718.354.824
5.2.2.18.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	119.718.354.824
5.2.2.19	Belanja Penghargaan kepada pegawai/masyarakat/Desa	94.450.000
5.2.2.19.01	Belanja penghargaan kepada pegawai	3.000.000
5.2.2.19.02	Belanja penghargaan kepada masyarakat	83.200.000
5.2.2.19.03	Belanja penghargaan kepada Desa/Kelurahan/Kecamatan/UPT Pasar	8.250.000
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	393.949.523
5.2.2.20.05	Belanja pemeliharaan saluran air	44.049.774
5.2.2.20.06	Belanja pemeliharaan gedung	95.474.749
5.2.2.20.07	Belanja pemeliharaan kolam	155.425.000
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Pintu Air	99.000.000
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.104.500.000
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.894.600.000
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	209.900.000
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	32.278.012.000
5.2.2.22.01	Belanja barang dana BOS	32.278.012.000

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.505.249.500
5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	22.361.240.500
5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	1.144.009.000
5.2.2.24	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/pihak ketiga	75.727.000
5.2.2.24.01	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat	60.927.000
5.2.2.24.02	Belanja barang yang akan dijual kepada pihak ketiga	14.800.000
5.2.2.25	Belanja Kepesertaan	493.850.000
5.2.2.25.01	Belanja kepesertaan pegawai	280.200.000
5.2.2.25.02	Belanja kepesertaan masyarakat	213.650.000
5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.040.158.500
5.2.2.27.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	16.275.000
5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.023.883.500
5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis masyarakat	43.375.000
5.2.2.28.02	Transportasi/uang saku peserta	38.675.000
5.2.2.28.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000
5.2.2.29	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.550.000
5.2.2.29.01	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.550.000
5.2.3	BELANJA MODAL	226.739.265.798
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	10.143.360.000
5.2.3.01.01	Belanja modal Pengadaan tanah kantor	41.360.000
5.2.3.01.02	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	2.000.000
5.2.3.01.06	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	400.000.000
5.2.3.01.32	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	9.700.000.000
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.758.985.000
5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	1.350.850.000
5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	475.000.000
5.2.3.03.08	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	504.140.000
5.2.3.03.10	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	3.495.000
5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	397.500.000
5.2.3.03.17	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda tiga	28.000.000
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2.500.000
5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	2.500.000
5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	65.000.000
5.2.3.06.04	Belanja modal Pengadaan perahu karet	65.000.000
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	558.000.000
5.2.3.08.09	Belanja modal alat bengkel lainnya	558.000.000
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	357.385.000
5.2.3.09.05	Belanja modal Alat Pemotong Rumput	39.000.000
5.2.3.09.07	Belanja modal peralatan pertanian	253.780.000
5.2.3.09.10	Belanja modal pengadaan handsprayer	1.200.000
5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan alat pemotong kayu (Senzo)	10.000.000
5.2.3.09.12	Belanja modal peralatan pertamanan (Gunting taman, pot, paranet)	53.405.000
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	782.439.000
5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	2.100.000
5.2.3.10.08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	9.250.000
5.2.3.10.11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.829.000
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan Genset	597.960.000
5.2.3.10.14	Belanja modal pengadaan vacum cleaner	5.000.000
5.2.3.10.15	Belanja modal Pengadaan tempat sampah	133.300.000
5.2.3.10.16	belanja modal pengadaan mesin absen pegawai	9.000.000
5.2.3.10.17	Belanja modal pengadaan mesin antrian pelayanan	24.000.000
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.325.503.400
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	221.350.000

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.11.03	Belanja modal Pengadaan brankas	20.850.000
5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	79.838.400
5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	1.950.000
5.2.3.11.07	Belanja modal Podium	46.000.000
5.2.3.11.08	Belanja modal Air Conditioner (AC)	198.030.000
5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan bendera/panji-panji	28.765.000
5.2.3.11.11	Belanja modal pengadaan kipas angin	16.680.000
5.2.3.11.12	Belanja modal pengadaan papan gambar/clipboard	201.630.000
5.2.3.11.13	Belanja modal pengadaan Televisi	108.250.000
5.2.3.11.14	Belanja modal pengadaan LCD	254.500.000
5.2.3.11.15	Belanja modal tralis jendela	59.070.000
5.2.3.11.16	Belanja modal pengadaan neon box	12.390.000
5.2.3.11.17	Belanja modal meja pelayanan	3.700.000
5.2.3.11.18	Belanja modal papan nama petunjuk	57.800.000
5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan Penampungan Air	6.600.000
5.2.3.11.24	Papan Display Elektronik	8.100.000
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.384.698.000
5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	481.470.000
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	2.630.741.000
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan laptop/note book	544.273.000
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	268.178.000
5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	59.900.000
5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	29.155.000
5.2.3.12.07	Belanja modal Pengadaan CPU	11.300.000
5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	13.675.000
5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	309.180.000
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	3.667.631.000
5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan Software	365.995.000
5.2.3.12.12	Belanja modal pengadaan meja komputer	3.200.000
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1.494.025.600
5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	320.174.500
5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	188.020.000
5.2.3.13.03	Belanja modal Pengadaan meja makan	13.314.000
5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	236.385.500
5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	265.650.000
5.2.3.13.06	Belanja modal Pengadaan kursi makan	21.000.000
5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	134.511.600
5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	91.900.000
5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	50.350.000
5.2.3.13.10	Belanja Modal pengadaan meja kursi tamu	125.220.000
5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	37.500.000
5.2.3.13.13	Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian	10.000.000
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	137.408.200
5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	1.745.000
5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	29.682.000
5.2.3.14.03	Belanja modal Pengadaan lemari makan	15.000.000
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	15.035.000
5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	14.500.000
5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan rak piring	1.597.000
5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	6.918.500
5.2.3.14.10	Belanja modal Seterika Listrik	1.549.500
5.2.3.14.11	Belanja modal Water Heater	10.500.000
5.2.3.14.12	Belanja modal jemuran pakaian	5.542.800

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.14.14	Belanja modal alat dapur lainnya	35.338.400
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	610.361.024
5.2.3.15.01	Belanja modal Pengadaan lampu hias/Lampu Emergency/ILampu Sejenisnya	150.000
5.2.3.15.02	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	5.130.000
5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan Gordyn	288.681.024
5.2.3.15.04	Belanja modal Taplak Meja, seprei, perlak bantal,selimut	25.425.000
5.2.3.15.05	Belanja modal Kaligrafi, Lukisan dan frame	14.880.000
5.2.3.15.07	Belanja modal Karpet	245.820.000
5.2.3.15.08	Belanja modal Bed Cover	29.300.000
5.2.3.15.09	Belanja modal Tempat Topi	975.000
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.853.405.600
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	174.205.000
5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	5.000.000
5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	76.300.000
5.2.3.16.04	Belanja Modal Sound System	142.572.000
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan Tripod dan Screen	1.000.000
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan peralatan studio lainnya	1.449.328.600
5.2.3.16.08	Belanja modal Antena Parabola	5.000.000
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	172.478.250
5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	12.000.000
5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faximili	22.690.000
5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	29.238.200
5.2.3.17.10	Belanja modal Pengadaan PABX	26.100.000
5.2.3.17.11	Belanja modal Internet	7.050.050
5.2.3.17.12	Belanja modal Pengadaan wireless	10.750.000
5.2.3.17.14	Belanja modal Pengadaan CCTV	64.650.000
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	880.327.000
5.2.3.18.01	Belanja modal Pengadaan timbangan	167.052.000
5.2.3.18.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS	10.000.000
5.2.3.18.10	Belanja modal Pengadaan alat uji kendaraan	699.275.000
5.2.3.18.11	Belanja modal pengadaan alat pengujian dan pengukuran hasil survey	4.000.000
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	12.956.216.800
5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	11.199.210.800
5.2.3.19.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	337.965.000
5.2.3.19.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak	5.500.000
5.2.3.19.07	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	1.282.000.000
5.2.3.19.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	110.541.000
5.2.3.19.15	Belanja Modal Alat keperawatan	21.000.000
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	985.141.000
5.2.3.20.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium	980.731.000
5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah	4.410.000
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	57.596.187.400
5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	53.897.507.200
5.2.3.21.04	Belanja modal trotoar	3.698.680.200
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	19.248.023.000
5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	19.248.023.000
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15.104.258.400
5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	9.260.662.400
5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	10.000.000
5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi drainase	4.595.746.000
5.2.3.23.14	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.237.850.000
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	6.222.425.500
5.2.3.24.02	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	1.200.000

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.24.05	Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas	64.540.000
5.2.3.24.08	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan	1.488.000.000
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan Lalu lintas	868.150.000
5.2.3.24.13	Belanja modal pembangunan taman	125.000.000
5.2.3.24.14	Belanja modal pengadaan pergola	177.365.500
5.2.3.24.15	Belanja modal pengadaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.498.170.000
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.167.105.000
5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	2.077.225.000
5.2.3.25.03	Belanja modal Pengadaan instalasi komunikasi data dan infrastruktur/ tower	89.880.000
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	44.971.829.153
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	18.784.892.500
5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	156.353.000
5.2.3.26.08	Belanja modal Gedung Sekolah	12.221.830.000
5.2.3.26.09	Belanja Modal Pagar Pengaman/Tralis	2.600.000
5.2.3.26.11	Belanja modal pengadaan konstruksi rumah tanaman (Screen House/Green House)	25.510.000
5.2.3.26.14	Belanja Moda Konstruksi Bangunan Atap	451.223.453
5.2.3.26.16	Belanja modal obyek wisata	269.560.000
5.2.3.26.18	Belanja modal konstruksi tempat ibadah	50.000.000
5.2.3.26.19	Belanja modal tempat parkir	552.660.000
5.2.3.26.21	Belanja modal gedung rumah sakit	91.064.200
5.2.3.26.22	Belanja modal tangga	6.000.000
5.2.3.26.24	Belanja modal pembangunan TPA	2.950.000
5.2.3.26.26	Belanja modal peningkatan gedung pemerintah daerah	750.000.000
5.2.3.26.27	Belanja modal pengadaan konstruksi pasar hewan	9.267.720.000
5.2.3.26.31	Belanja modal pengadaan konstruksi halaman kantor	799.466.000
5.2.3.26.34	Belanja Modal Pengadaan Tempat PKL Darurat	1.500.000.000
5.2.3.26.35	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Halaman Sekolah	40.000.000
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	93.450.000
5.2.3.27.09	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	6.250.000
5.2.3.27.10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	4.950.000
5.2.3.27.12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	5.420.000
5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	40.460.000
5.2.3.27.14	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	3.300.000
5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	4.500.000
5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	20.300.000
5.2.3.27.34	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	8.270.000
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.000.000
5.2.3.28.07	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Musik	5.000.000
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	84.410.200
5.2.3.30.12	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	9.410.200
5.2.3.30.13	Belanja modal Pengadaan peralatan SAR	75.000.000
5.2.3.31	Belanja Modal Lainnya	1.379.068.500
5.2.3.31.01	Belanja modal alat olah raga	8.550.000
5.2.3.31.03	Belanja modal alat permainan	33.692.500
5.2.3.31.04	Belanja modal pengadaan prasarana dan sarana perumahan	1.336.826.000
5.2.3.32	Belanja Modal BLUD	19.176.838.771
5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD	19.176.838.771
5.2.3.33	Belanja Modal BOS	17.223.436.000
5.2.3.33.01	Belanja Modal BOS	17.223.436.000
*	Jumlah Belanja	1.723.357.367.620
*	SURPLUS (DEFISIT)	(23.516.252.569)
6	PEMBIAYAAN	23.516.252.569

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	76.514.203.661
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	46.514.203.661
6.1.1.01	Pelampauan penerimaan PAD	21.214.203.661
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	16.000.000.000
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	5.000.000.000
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang sah	214.203.661
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	25.300.000.000
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	300.000.000
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	4.000.000.000
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000
6.1.1.04.04	Belanja Modal	8.000.000.000
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan nomor	15.000.000.000
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000
6.1.7.01	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000
6.1.7.01.06	Penerimaan Retensi	15.000.000.000
*	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	76.514.203.661
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.997.951.092
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.997.951.092
6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	9.997.951.092
6.2.2.02.01	PD BPR BKK Temanggung	772.473.000
6.2.2.02.02	PD Aneka Usaha	850.000.000
6.2.2.02.03	PD BPR Bank Pasar	2.300.000.000
6.2.2.02.04	PT Bank Jateng	3.400.000.000
6.2.2.02.06	PD BKK Pringsurat	550.000.000
6.2.2.02.07	PD Apotik Waringin Mulyo	243.916.000
6.2.2.02.08	Perusahaan Daerah Air Minum	1.500.000.000
6.2.2.02.09	PD Bumi Phala Wisata	231.562.092
6.2.2.02.10	PT. Jamkrida	150.000.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	28.000.000.000
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	17.510.603.000
6.2.3.01.01	Pembayaran Pokok Hutang pada Pusat Investasi Pemerintah	17.510.603.000
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank	10.489.397.000
6.2.3.03.01	Bank...	10.489.397.000
6.2.7	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000
6.2.7.01	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000
6.2.7.01.06	Retensi/Jaminan pemeliharaan	15.000.000.000
*	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	52.997.951.092
*	Pembiayaan Netto	23.516.252.569
*	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0



 BUPATI TEMANGGUNG



 M. BAMBANG SUKARNO